

Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19

Lathif Hanafir Rifqi, Ana Zahrotun Nihayah

UIN Walisongo Semarang

Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang Jawa Tengah

Lathif.hanafir.rifqi@walisongo.ac.id

Abstrak – Pandemi covid 19 di tahun 2020 sangat berdampak pada perekonomian nasional. Beberapa indikator makro ekonomi menunjukkan angka yang tidak biasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif terhadap empat indikator makro ekonomi yaitu produk domestik bruto (PDB), *BI rate*, jumlah uang beredar, dan inflasi. Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi dari studi kepustakaan. PDB mengalami kontraksi di angka negatif sebesar (-2,07)%. Angka terendah sejak 1998 yang mengalami pertumbuhan negatif (13,13%). Dari sisi moneter, bank indonesia konsisten menurunkan atau mempertahankan tingkat suku bunga *BI Rate* pada angka 3,75%. Angka terendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah uang beredar menunjukkan posisi cukup ironis, dimana mengalami kenaikan cukup signifikan pada desember 2020 sebesar 6.900 triliun rupiah dari 6.136,6 triliun pada bulan yang sama di tahun 2019. Dari sisi nominal, ini adalah kenaikan terbesar dalam satu tahun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara, inflasi pada angka 1,68% atau terendah setelah era reformasi tahun 1998. Daya beli masyarakat yang menurun, mengakibatkan permintaan konsumtif juga menurun sehingga menurunkan harga barang atau jasa secara agregat.

Kata Kunci: Pandemi covid-19, Produk Domestik Bruto, *BI Rate*, Uang Beredar, Inflasi

I. PENDAHULUAN

Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak biasa dalam bidang ekonomi. Pandemi covid-19 yang sukar diprediksi waktu berakhirnya, membuat sejumlah pakar kesulitan memberikan analisa perubahan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 terkoreksi pada angka negatif -2,07 persen (c-to-c) dibanding dengan PDB tahun sebelumnya (BPS: 2021). Angka yang sangat buruk, sejak kali terakhir dialami pada tahun 1998 dengan pertumbuhan ekonomi negatif (-13,13) % (databoks.katadata.co.id: 2018). Namun, angka ini menjadi angka biasa jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia 2020 sebesar (-3,5) %, rata-rata negara ASEAN (-3,7) %, dan negara-negara maju lainnya (IMF, 2021). Hampir semua negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020. Tercatat dari sumber CNBC (2021) hanya ada tiga negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif yaitu China, Vietnam, dan Taiwan. Melihat fenomena data tersebut, patut dianalisa beberapa komponen pendukung dari PDB, yang memiliki dampak signifikan dari pandemi covid-19 ini.

Adanya indikasi buruk dari pertumbuhan ekonomi tersebut, membuat pemerintah dan lembaga terkait terus aktif membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif ataupun antisipatif. Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan moneter, merespon penurunan pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan penurunan suku bunga acuan. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan pada angka 3,75% pada Desember 2020 dan itu menjadi suku bunga terendah sejak krisis 1990-an akhir (databoks.katadata.co.id: 2018). Melalui pengamatan sederhana, penurunan suku bunga tidak sesuai harapan dalam hal merespon pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, namun secara hakiki tujuan akhir dari kebijakan moneter bermuara pada pertumbuhan ekonomi secara riil yaitu bertumbuhnya produksi, konsumsi barang dan jasa. Menjadi bahasan menarik untuk mengupas bagaimana dampak kebijakan moneter bank indonesia di masa pandemi.

Saat bank indonesia secara bertahap menurunkan suku bunga acuan, indikator uang beredar mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berada pada angka 6.136,6 triliun rupiah pada desember 2019, pertumbuhan uang beredar meningkat signifikan menjadi 6.900 triliun rupiah pada bulan yang sama di tahun 2020. Jika ini dikaitkan dengan penurunan suku bunga yang ditetapkan bank indonesia, maka hal ini menjadi suatu hal yang konsisten. Hal ini karena, penurunan suku bunga diharapkan merespon masyarakat agar memanfaatkan pinjaman di bank (untuk produktif atau konsumtif), yang selanjutnya akan terjadi pertumbuhan uang beredar. Namun, apalah artinya jika masyarakat banyak memiliki uang (karena pertumbuhan uang beredar), namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi riil (barang dan jasa). Munculnya fenomena dari pengamatan sederhana ini, menarik untuk dikaji bagaimana distribusi uang beredar yang ada di masyarakat.

Indikator pertumbuhan uang beredar biasanya memiliki hubungan yang positif dengan tingkat inflasi. Uang beredar yang cenderung tinggi, umumnya juga diikuti oleh angka inflasi yang tinggi. Namun, data awal menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2020 nilai uang beredar mengalami kenaikan yang signifikan, justru angka inflasi menunjukkan penurunan di angka 1,68%. Angka ini termasuk yang terendah sejak era reformasi. Dikaitkan dengan fenomena uang beredar pada paragraf sebelumnya, menjadi bahasan menarik kira-kira apa saja pemicu inflasi yang rendah. Bagaimana perilaku “belanja” masyarakat pada masa pandemi dilihat dari komponen-komponen pendukung inflasi itu sendiri Berdasarkan rangkaian paparan gambaran indikator makro ekonomi di atas, riset ini difokuskan pada empat pertanyaan pokok yaitu :

1. Bagaimana analisa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana analisa perkembangan kebijakan suku bunga acuan *BI rate* pada masa pandemi covid 19?
3. Bagaimana analisa pertumbuhan uang beredar pada masa pandemi covid 19?
Bagaimana analisa perkembangan inflasi pada masa pandemi covid 19?

II. KAJIAN LITERATUR

2.1 Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan (bps.go.id:2021). Selain dengan ukuran dasar harga konstan, PDB juga diukur dengan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Namun, kelemahan penggunaan ukuran harga berlaku adalah pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan nilai riilnya. Hal ini dikarenakan nilai ekonomi yang tumbuh bisa jadi hanya disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa secara agregat atau inflasi. Hakikatnya, ekonomi tumbuh adalah ketika satuan produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat atau lembaga dalam suatu negara mengalami kenaikan (Khairiati: 2019). Semisal pada tahun ini suatu perusahaan memproduksi 1000 ton semen, kemudian tahun selanjutnya memproduksi 1100 ton semen, maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi 100 ton semen atau 10 persen. Namun, jika negara tersebut mengalami penurunan produksi semisal 910 ton, maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 10 persen. Ini contoh sederhana jika suatu negara hanya memproduksi barang semen saja. Tentunya, tidak hanya satu barang atau jasa yang diproduksi masyarakat atau lembaga di suatu negara dalam satu tahun.

Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan harga berlaku. Jika suatu negara memproduksi 1000 semen pada tahun lalu dengan harga 100 rupiah per semen, maka produk domestik bruto negara tersebut pada tahun lalu sebesar 100.000 rupiah. Ketika tahun ini negara tersebut melakukan produksi semen dengan kapasitas yang sama (1000 ton), kemudian harganya berubah menjadi 110 rupiah setiap satu semen, maka negara tersebut pada tahun ini memiliki produk domestik bruto sebesar 110.000

rupiah atau naik 10 persen. Kenaikan ini dipandang semu, karena sebetulnya kualitas pertumbuhan ekonomi negara tersebut tetap sama yaitu hanya mampu memproduksi semen sebesar 1000 ton (tidak berbeda dengan tahun sebelumnya). Inilah yang menjadi kelemahan jika menggunakan ukuran harga berlaku sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa dikiaskan, ketika seseorang memiliki tambahan pendapatan, namun ketika harga-harga naik sebesar kenaikan pendapatan tersebut, maka secara riil tidak ada nilai kenaikan dari pendapatan yang diterima. Daya beli dari orang yang dicontohkan tetap sama akibat adanya kenaikan harga atau inflasi.

Secara teori komponen pengukuran PDB dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan lapangan usaha dibagi dalam 9 komponen yang terdiri dari ; a) industri pengolahan, b) pertanian, kehutanan, dan perikanan, c) perdagangan, reparasi mobil dan motor, d) konstruksi, e) pertambangan dan penggalian, f) transportasi dan pergudangan, g) informasi dan komunikasi, h) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, i) komponen lain yang tidak termasuk dalam kategori yang sudah disebutkan. Sementara, PDB dengan pendekatan pengeluaran diukur dengan enam komponen yaitu, a) pengeluaran konsumsi rumah tangga, b) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), c) pengeluaran konsumsi pemerintah, d) pembentukan modal tetap bruto, e) ekspor barang dan jasa, serta f) impor barang dan jasa. Dua pendekatan yang disebutkan memiliki nilai akhir substansi pertumbuhan ekonomi yang sama. Perbedaan komponen pengukuran agar menjelaskan pertumbuhan ekonomi sesuai kelompok/komponen yang diukur.

2.2 BI Rate

BI Rate yang sejak 19 Agustus 2016 diganti menjadi *BI 7 day reverse repo rate (BI7DRR)* merupakan kerangka operasi meneter yang dilakukan oleh bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah (bi.go.id). Nilai BI7DRR selalu *update* oleh bank Indonesia setiap sebulan sekali. Penetapan nilai BI7DRR salah satunya mempertimbangkan harga barang dan jasa yang berlaku di masyarakat. Jika dirasa harga barang dan jasa secara agregat mengalami kenaikan (inflasi), maka BI7DRR akan dinaikkan. Kenaikan harga secara agregat ini dinilai akibat dari peredaran uang di masyarakat yang terlalu banyak dibanding dengan produksi barang dan jasa yang sedang berjalan. Akibat dari hal tersebut, maka BI menaikkan nilai BI7DRR agar masyarakat maupun bank umum tertarik menempatkan dananya untuk sementara waktu di bank Indonesia. Dengan begitu, uang yang beredar di masyarakat akan cenderung berkurang, dan inflasi diharapkan dapat turun kembali.

Keadaan sebaliknya jika nilai rupiah cenderung stabil, namun perekonomian terlihat lemah. Dalam keadaan demikian bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan harapan dapat diikuti oleh bank umum. Penurunan suku bunga yang dilakukan oleh bank umum akan menstimuli masyarakat agar mengajukan pembiayaan untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif. Dengan demikian perekonomian kembali bergairah yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Krisnaldy: 2017).

2.3 Uang Beredar

Sekali lagi, hakikat pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan di sektor riil yaitu pertumbuhan barang dan jasa. Sektor riil dapat tumbuh dengan cepat jika didukung dengan alat tukar yang likuid. Alat tukar yang likuid ini kemudian disebut dengan uang. Uang dari masa ke masa mengalami metamorfosa karena fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Dahulu tukar menukar barang dan jasa menggunakan istilah *barter*. Perokonomian tidak berjalan dengan cepat dikarenakan mengalami kesulitan diantara masyarakat yang ingin *barter*. Kemudian, munculah uang yang disepakati oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk memperlancar pertukaran barang dan jasa. Emas dan perak pernah menjadi alat tukar yang bertahan dalam waktu yang relatif lama sebelum bertransformasi menjadi uang kartal (kertas dan logam). Keberadaan emas dan perak pada saat itu juga tidak sanggup menopang perdagangan yang kapasitasnya semakin besar dari masa ke masa. Uang kertas menjadi solusi beberapa waktu dalam mengantisipasi kelangkaan emas tersebut. Munculnya uang kertas, sekali lagi adalah menjadi alat tukar yang likuid sehingga perdagangan barang dan jasa semakin cepat. Namun, pada periode akhir abad 19, muncullah uang giral dan kuasi yang semakin mempercepat proses pertukaran barang dan jasa. Proses transaksi yang cepat karena dibantu dengan teknologi yang terupdate seperti kartu atm, *mobile banking*, *internet banking*, dan aplikasi-aplikasi lainnya, membuat uang giral dan kuasi diprediksi akan menjadi uang yang paling *available* dimasa yang akan datang.

Uang dalam sistem moneter saat ini dibedakan dalam beberapa jenis yaitu uang kartal, uang giral, uang kuasi, dan surat berharga selain saham. Secara teori ada pengelompokan jenis mata uang yaitu

kelompok M1 dan M2 (Solikin & Suseno: 2002). M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral, sementara M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi dan surat berharga selain saham. Dengan kata lain, M2 adalah representasi dari seluruh uang beredar yang ada di masyarakat. Uang kartal yang beredar di masyarakat adalah uang kertas dan logam di luar bank Indonesia, bank umum dan BPR. Uang kartal yang berada dalam lemari ketiga jenis bank tersebut tidak tergolong dalam uang beredar. Uang giral dibagi menjadi dua yaitu uang giral dalam rupiah dan uang giral dalam bentuk valuta asing. Uang giral dalam bentuk rupiah tergolong dalam M1, sementara uang giral berbentuk valuta asing termasuk dalam golongan uang kuasi. (Arif, 2014)

Uang beredar di masyarakat akan berfluktuasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara garis besar dikelompokkan dalam dua faktor yaitu aktiva luar negeri bersih dan aktiva dalam negeri bersih. (Solikin & Suseno:2002). Aktiva luar negeri bersih merupakan kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh negara. Aktiva dalam negeri bersih dijabarkan dalam berbagai komponen. Komponen pertama yaitu tagihan bersih terhadap pemerintah pusat. Disebut tagihan bersih adalah ketika jumlah semua tagihan telah dikurangkan dengan semua kewajiban terhadap pemerintah pusat. Komponen aktiva dalam negeri bersih yang kedua adalah tagihan kepada sektor lainnya. Tagihan berupa tagihan kepada lembaga keuangan lain, tagihan kepada pemerintah daerah, tagihan kepada lembaga keuangan bukan BUMN, tagihan kepada sektor swasta. Dua komponen lain berupa modal dan lainnya.

Berbagai jenis uang dengan metamorfosisnya yang telah diuraikan, peredarannya dikendalikan oleh otoritas moneter yang disebut dengan bank sentral. Bank sentral menggunakan neraca moneter sebagai kontrol peredaran uang di masyarakat. Jika uang beredar di masyarakat dinilai terlalu sedikit, maka dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi akan lambat karena kesulitan transaksi. Sebaliknya, ketika pertumbuhan uang beredar di masyarakat dinilai terlalu melebihi pertumbuhan barang dan jasa (sektor riil), maka dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi (Krisnaldy: 2017)

2.4 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang diukur secara agregat. Agregat yang dimaksud adalah pengukuran menggunakan sampel terhadap harga barang dan jasa yang ditransaksikan dalam waktu serta wilayah tertentu. Adakalanya diantara kelompok barang atau jasa yang diukur mengalami kenaikan harga, sementara kelompok lain mengalami penurunan harga. Agregasi dari seluruh kelompok harga barang dan jasa yang diukur akan mendapatkan hasil apakah harga-harga kecenderungannya menaik atau menurun. Jika kecenderungannya adalah menaik maka disebut dengan inflasi, sebaliknya apabila harga-harga memiliki kecenderungan menurun maka disebut dengan deflasi.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2021) memiliki alat ukur yang disebut dengan indeks harga konsumen (IHK). IHK dikelompokkan dalam berbagai jenis pengeluaran. Kelompok tersebut adalah a) Makanan, minuman, dan tembakau; b) pakaian dan alas kaki; c) perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; d) perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; e) kesehatan; f) transportasi; (g) informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; (h) rekreasi, olahraga, dan budaya; (f) pendidikan; (g) restoran; (h) perawatan pribadi dan lainnya. IHK akan menghasilkan sebuah indeks yang mana perubahan angka tersebut menjadi penentu apakah terjadi inflasi atau deflasi. Jika indeks harga pada tahun berjalan lebih tinggi dari tahun dasarnya, maka di waktu tersebut telah terjadi inflasi. Sebaliknya, ketika indeks harga tahun berjalan menunjukkan lebih rendah dari indeks tahun dasarnya maka disimpulkan bahwa pada tahun tersebut telah terjadi deflasi. Penetapan harga acuan pada tahun dasar sangat penting dalam menghitung IHK. Penentuan harga acuan pada tahun dasar umumnya menggunakan asumsi bahwa pada tahun tersebut perekonomian dianggap stabil.

Ada beberapa penyebab dari perubahan angka inflasi. Beberapa teori mengungkapkan bahwa inflasi hanya dapat terjadi karena ada penambahan jumlah uang beredar. Tanpa adanya penambahan uang beredar, kenaikan harga karena kelangkaan barang atau jasa hanya berlaku untuk sementara waktu saja. Dengan penambahan uang beredar (melalui pencetakan uang baru, proses kredit) maka kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang tertentu akan meningkat. Meskipun disisi lain jumlah penambahan produksi barang atau jasa tersebut secara prosentase tidak lebih besar daripada prosentase penambahan uang beredar itu sendiri. Adanya ketidakseimbangan presentase penambahan uang beredar yang lebih tinggi dibanding prosentase pertumbuhan barang dan jasa ini yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Teori ini disebut dengan teori kuantitas (Boediono: 1988).

Penjelasan selanjutnya dari teori kuantitas adalah adanya unsur psikologis masyarakat yang berperan terhadap kenaikan harga-harga barang. Pada awalnya, kenaikan harga akibat prosentase penambahan uang beredar yang lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi barang dan jasa akan berdampak pada kenaikan

harga secara agregat yang relatif kecil. Namun, ketika kondisi ini berulang dan terjadi secara terus menerus, maka kenaikan harga barang dan jasa akan menjadi suatu hal yang wajar dalam psikologis (stigma) masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dari waktu ke waktu akan cenderung memberikan (menaikkan) harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dengan adanya fasilitas kredit yang dapat menambah jumlah uang beredar, maka kenaikan harga dari barang atau jasa akan tetap terbeli oleh masyarakat yang membutuhkan.

Teori inflasi yang kedua adalah teori dari Keynes. Menurut Keynes pada dasarnya masyarakat memiliki keinginan yang tidak terbatas, sementara kemampuan untuk memenuhinya memiliki keterbatasan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perebutan rezeki diantara berbagai golongan dari masyarakat. Kondisi ini direpresentasikan ketika permintaan efektif dari masyarakat selalu melebihi dari barang dan jasa yang tersedia. Kondisi demikian disebut dengan *inflationary gap*. Dengan didukung pertambahan uang beredar melalui kredit atau pencetakan uang baru, maka *inflationary gap* ini akan menimbulkan inflasi.

Golongan pertama yang dimaksud adalah pemerintah yang menginginkan output lebih besar dari kemampuan fiskal yang dimiliki. Dalam kondisi ini, anggaran fiskal akan dibuat defisit sehingga dapat didanai dengan kredit (penambahan uang beredar). Begitu juga dengan investor atau pengusaha. Ekspansi yang dilakukan terkadang nilainya tidak lebih tinggi dibanding dengan uang yang dibutuhkan. Atau dari golongan pegawai yang meminta kenaikan gaji tanpa diimbangi dengan produktifitas yang mumpuni. Hal ini hanya memicu kenaikan kepemilikan uang beredar di masyarakat, sementara produktifitas rendah. Hasil produktifitas yang rendah ini kemudian dibayar dengan harga lebih tinggi dari uang yang dimiliki. Jika ini terus terjadi dan mencapai prosentase angka inflasi yang tinggi (*hiperinflasi*), maka nilai dari sebuah mata uang yang digunakan akan menjadi turun (melemah). Tidak ada artinya memiliki uang dalam jumlah besar, namun harga-harga terhadap kebutuhan relatif tinggi. (Boediono; 1988). Namun, dalam berbagai penelitian justru beberapa negara yang mengalami inflasi, mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik (Sukirno: 2010). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi bukanlah suatu yang harus dihindari. Inflasi yang terkendali masih memiliki dampak positif terhadap perekonomian (Sipayung: 2013).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari dokumentasi studi kepustakaan (Sugiyono: 2012). Peneliti memperoleh data sekunder dari website lembaga resmi diantaranya badan pusat statistik, bank Indonesia, otoritas jasa keuangan. Analisis data menggunakan teknis analisis deskriptif terhadap data yang diteliti. Secara spesifik, analisis data pada penelitian ini adalah menguraikan empat data indikator ekonomi makro yaitu produk domestik bruto, BI rate, uang beredar, dan inflasi. Data yang diuraikan adalah terbatas pada data tahun 2020 atau pada masa pandemi covid-19.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Bruto pada Masa Pandemi Covid 19

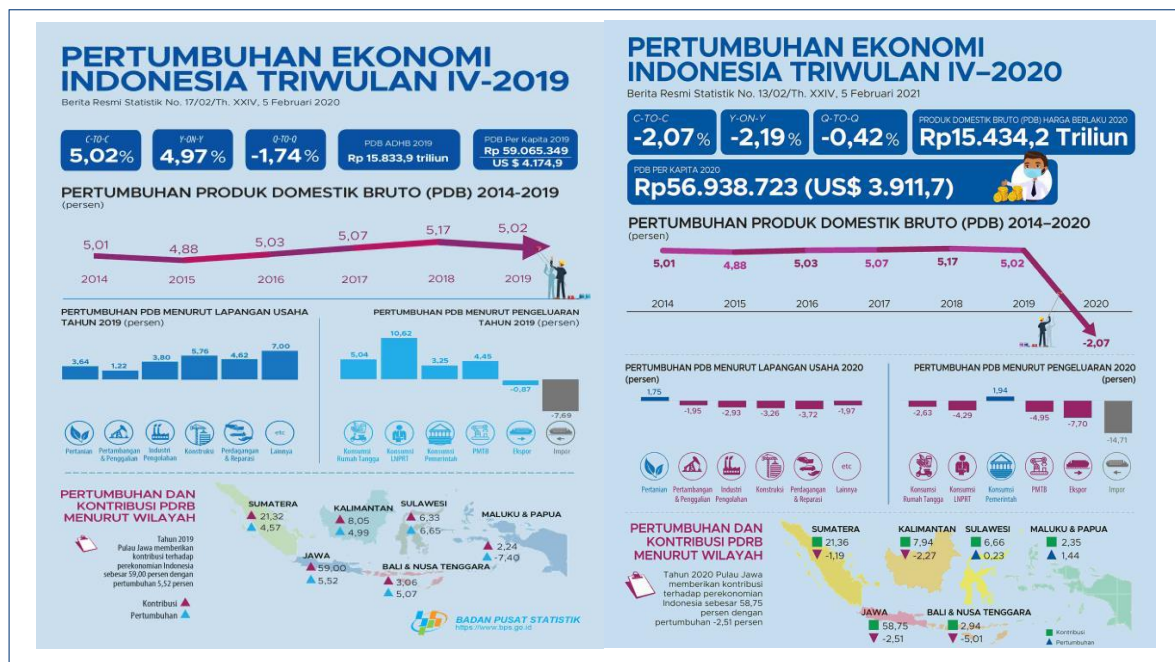
Produk Domestik Bruto pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif di angka (-2,07) persen (c-to-c). Angka negatif ini menjadi yang pertama sejak terakhir kali Indonesia mengalaminya pada tahun 1998. Dilihat dari perspektif lapangan usaha, lini sektor penghitungnya berada diangka negatif kecuali sektor pertanian yang masih menunjukkan angka positif 1,75 persen. Diantara sektor-sektor pendukung tersebut, sektor perdagangan dan reparasi mengalami penurunan paling tajam yaitu -3,72 persen. Sektor yang mengalami penurunan tajam selanjutnya adalah sektor konstruksi sebesar -3,26. Kemudian sektor lain yang mengalami penurunan adalah sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar -2,93 persen dan -1,95 persen. Sementara, sektor lainnya menyumbang penurunan PDB sebesar -1,97 persen.

Pembatasan kegiatan masyarakat sangat berdampak pada aktivitas ekonomi. Di sektor perdagangan banyak pusat perbelanjaan yang mengalami pembatasan jam operasional. Kondisi ini tentunya mengurangi transaksi perdagangan secara agregat. Daya beli masyarakat yang menurun akibat menurunnya pendapatan menjadi faktor lain pemicu merosotnya angka perdagangan. Di sektor reparasi juga mengalami hal demikian. Mobilitas masyarakat yang terbatas, membuat peralatan seperti kendaraan, mesin pabrik tidak digunakan secara optimal. Sehingga kebutuhan jasa reparasi tidak begitu diperlukan. Kondisi ini menurunkan pendapatan penyedia jasa reparasi secara agregat. Sektor konstruksi mengalami penurunan tajam yang kedua setelah sektor perdagangan dan reparasi. Kondisi pandemi yang tidak pasti membuat investor menunggu sementara waktu terhadap kelanjutan proyek-proyek yang dijalankan. Sebagian besar

proyek tertunda karena banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi. Proyek-proyek krusial dan strategis pemerintah yang tertunda, berdampak pada penundaan proyek lain yang menjadi pendukung dari proyek pemerintah tersebut.

Di sektor industri pengolahan, penurunan juga terjadi diakibatkan oleh beberapa hal. *Supply* bahan baku terutama impor menjadi terbatas karena menurunnya produksi bahan baku dari negara asal. Daya beli masyarakat yang menurun, membuat produksi dikurangi pada tingkat yang efisien. Pembatasan jam kerja juga mempengaruhi kapasitas produksi di bawah angka normal. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan, meskipun angkanya masih lebih baik dari tiga sektor yang diuraikan sebelumnya. Kebutuhan barang hasil tambang dan galian yang menurun seiring kebutuhan berbagai sector hasil tambang yang diturunkan. Penurunan kebutuhan ini akibat terhentinya proyek secara sementara dalam masa pandemi. Meskipun sebetulnya kapasitas produksi masih dapat ditingkatkan, namun penjualan yang rendah karena permintaan yang menurun tetap menjadi faktor pemicu menurunnya pertumbuhan sector pertambangan dan penggalian.

Diantara sektor pada pendekatan lapangan usaha, sektor pertanian menjadi satu-satunya sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif. Hal ini diperkirakan karena permintaan kebutuhan dari hasil pertanian masih cukup tinggi. Kebutuhan hasil pertanian yang terkait dengan perobatan herbal mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Kebutuhan hasil pertanian untuk kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak masih relative stabil bahan menaik karena untuk cadangan logistik pemerintah. Produsen pertanian tidak terlalu terdampak pada pembatasan kegiatan karena produksi dilakukan pada daerah yang jauh dari perkotaan. Pembatasan kegiatan masyarakat di perkotaan cenderung lebih ketat daripada pada daerah pedesaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 dan 2021

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV tahun 2019 dan 2020

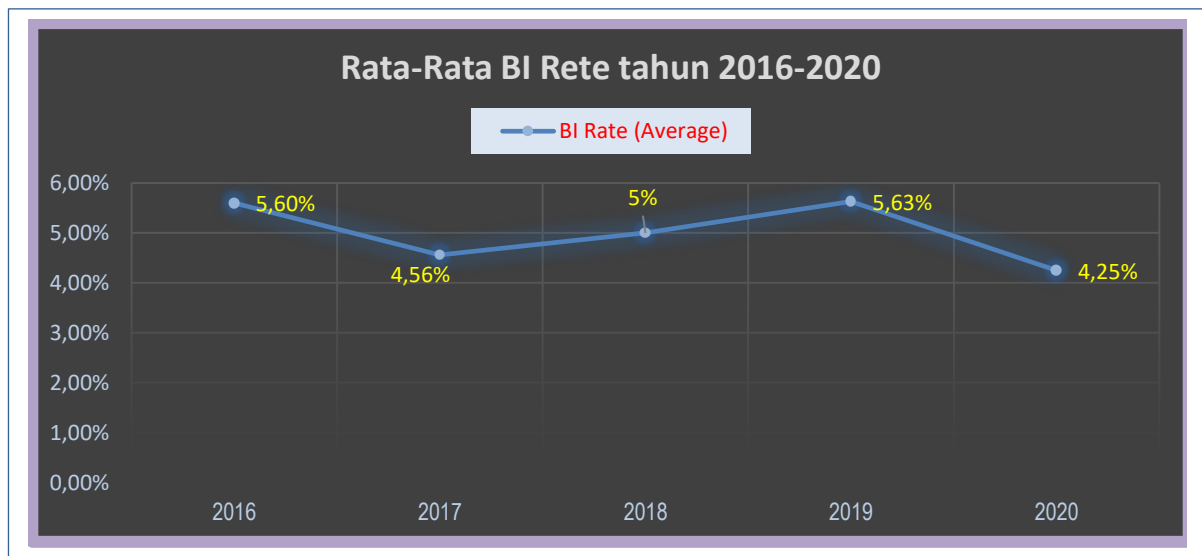
PDB jika diukur dari perspektif pengeluaran juga menunjukkan satu komponen yang bertumbuh positif yaitu pengeluaran pemerintah sebesar 1,94 persen. Pemerintah meningkatkan belanja terutama untuk kebutuhan penanggulangan pandemi. Pengeluaran untuk penanganan pandemi begitu luar biasa sehingga mengurangi anggaran belanja pada pos lain di APBN. Pos anggaran pada infrastruktur ataupun sektor produktif lain menurun drastis sehingga perekonomian tidak bertumbuh dengan baik. Konsekuensi yang harus diambil pemerintah pada masa krisis yang terjadi. Sektor pendekatan pengeluaran yang kedua adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tumbuh negatif diangka (-2,63)%. Beberapa perusahaan terpaksa merumahkan pegawainya secara sementara ataupun permanen. Angka pengangguran menaik selama masa pandemi. Pendapatan rumah tangga menurun sehingga menurunkan daya beli. Akibatnya rumah tangga harus mengurangi tingkat konsumsinya untuk disesuaikan dengan penurunan pendapatan.

Lembaga Negara Pelayan Rumah Tangga (LNPRRT) mengalami penurunan yang luar biasa. Mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,62 % pada tahun 2019, LNPRRT anjlok pada angka negatif (-4,29)% di tahun 2020. Pengalihan anggaran pada penanganan pandemi membuat sebagian besar lembaga ini mengalami pemotongan anggaran. Penurunan anggaran yang signifikan membuat konsumsi lembaga secara agregat juga menurun. Komponen keempat yang diukur yaitu Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB mengalami penurunan sebesar (-4,95%). Ketidakpastian akibat pandemi membuat investor menunda alokasi investasi pada berbagai bidang di Indonesia. Penanaman modal ini sebetulnya sedang diintensifkan pemerintah dengan membuat regulasi pendukungnya. Namun, faktor pandemi masih menjadi faktor pertimbangan utama terhadap keputusan investasi.

Pada sektor ekspor impor keduanya juga menunjukkan angka pertumbuhan negatif. Ekspor turun sebesar (-7,70) %, sementara impor (-14,71) %. Pembatasan kegiatan masyarakat membuat produsen ekspor mengalami penurunan produksi akibat salah satunya pembatasan tenaga kerja. Permintaan dari luar negeri juga cenderung menurun akibat daya beli masyarakat negara lain yang ikut turun. Sementara dalam bidang impor terjadi penurunan yang tinggi diakibatkan oleh produksi perusahaan luar negeri yang menurun. Akibatnya, *supply* barang ke dalam negeri menjadi terbatas. Di samping kebutuhan barang impor yang cenderung dikurangi oleh perusahaan atau masyarakat dalam negeri. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya akibat daya beli yang menurun karena menurunnya pendapatan. Namun, angka impor yang cenderung turun sebetulnya menjadi suatu hal yang diharapkan. Angka impor yang rendah diharapkan dapat melindungi produsen dalam negeri yang memiliki produk sejenis dengan barang impor tertentu.

BI Rate pada Masa Pandemi Covid 19

Sejak 2019, BI rate menunjukkan angka yang menurun. Berada pada angka 6% pada Januari 2019, suku bunga turun atau tetap secara bertahap dengan nilai akhir pada angka 3,75% di bulan Desember 2020. BI rate rata-rata pada tahun 2019 adalah 5,63% kemudian turun signifikan pada tahun 2020 dengan rata-rata 4,25 %. BI rate rata-rata di tahun 2020 memiliki nilai rata-rata paling kecil yaitu 4,25%. Ini merupakan rata-rata terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Sejatinya suku bunga yang rendah akan menstimulasi investor untuk bergairah memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan jasa rendah. Namun, kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian membuat nilai investasi sangat dipengaruhi oleh faktor lain selain tingkat suku bunga.



Sumber: Data Bank Indonesia yang diolah

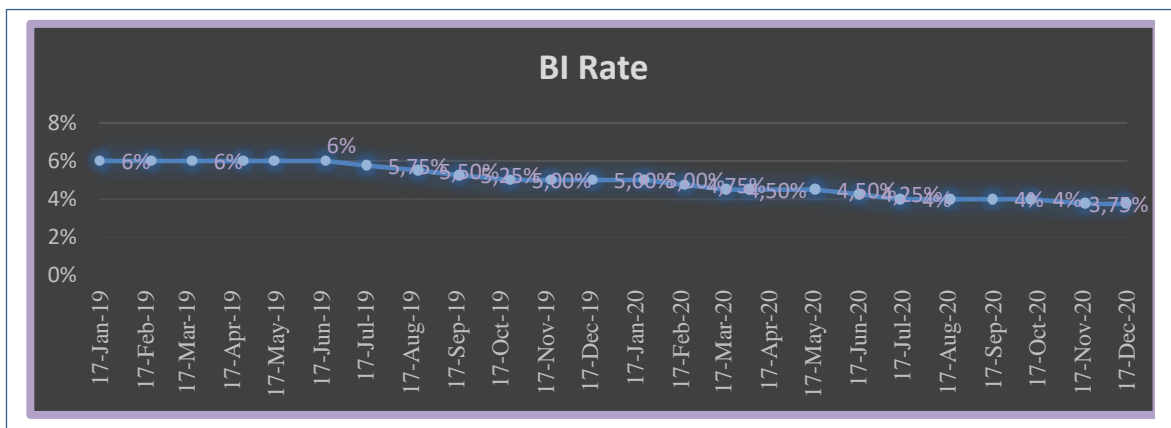
Gambar 2. Data Rata-Rata BI Rate Tahun 2016-2020

BI melihat perekonomian Indonesia perlu terus dipulihkan agar mengalami pertumbuhan positif setelah terpuruk akibat pandemi covid 19. Penurunan ini diharapkan dapat diikuti oleh lembaga keuangan, sehingga angka pembiayaan untuk sektor produktif prioritas terus meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi, kebijakan suku bunga tidak pernah mengalami kenaikan sejak Januari 2019.

BI terus menurunkan atau mempertahankan suku bunga karena melihat potensi sektor produktif yang dapat tumbuh secara cepat setidaknya selama tahun 2019. Penurunan suku bunga pada tahun 2020 tetap konsisten dilakukan dengan mempertimbangkan perekonomian yang lesu karena pandemi covid 19. Kebijakan ini juga konsisten dengan angka inflasi yang rendah pada tahun 2020.

Berbeda dengan tahun 2017 dan 2018, inflasi yang tinggi menyebabkan bank Indonesia cenderung menaikkan angka suku bunga. Gairah masyarakat Indonesia yang tumbuh tinggi sehingga produksi dan konsumsi meningkat membuat kebutuhan domestic naik signifikan. Kondisi ini memicu meningkatnya angka pinjaman uang di bank sehingga menambah uang beredar yang selanjutnya berdampak pada inflasi.

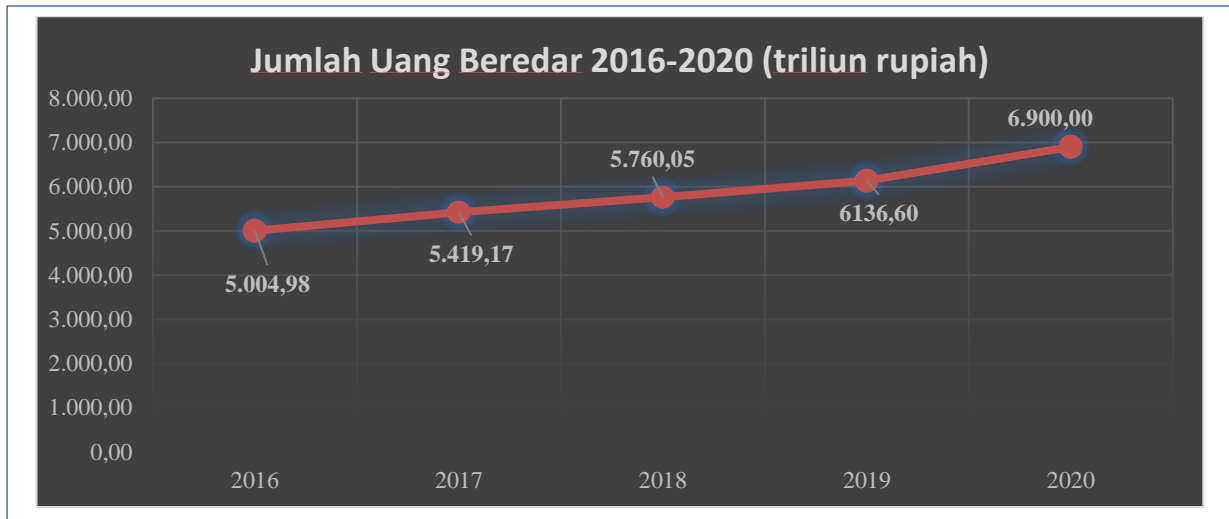
BI rate sejak 2019 selalu diturunkan secara bertahap dengan rata-rata menetapkan angka 0,25 basis poin sebagai angka peubah. Penurunan ini masih dalam batas kehati-hatian agar industri keuangan tidak mengalami keterkejutan. Keterkejutan akan berdampak pada persaingan pasar keuangan yang tidak sehat. Salah satu akibatnya adalah munculnya spekulasi pasar uang yang memanfaatkan perubahan suku bunga yang drastis.



Sumber: Data Bank Indonesia yang diolah
Gambar 3. Data BI Rate Tahun 2019-2020

Uang Beredar pada Masa Pandemi Covid 19

Sesuai fungsinya, uang adalah alat tukar yang bertujuan mempercepat pertukaran barang dan jasa. Jika pertukaran dapat berjalan dengan cepat, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan produksi dan konsumsi, selanjutnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam peredaran uang di Indonesia. Peredaran uang dikontrol dengan memperhatikan neraca moneter (Ascarya: 2002). Mekanisme kerja neraca moneter adalah melihat perbandingan antara perubahan sektor riil dan sektor moneter agar terjadi keseimbangan. Ketidakseimbangan akan memunculkan masalah makro ekonomi. Jika supply uang terlalu tinggi terhadap nilai pertumbuhan sector riil, maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika supply uang beredar rendah, maka sektor riil tidak dapat berjalan dengan cepat, sehingga terjadi perlambatan ekonomi.



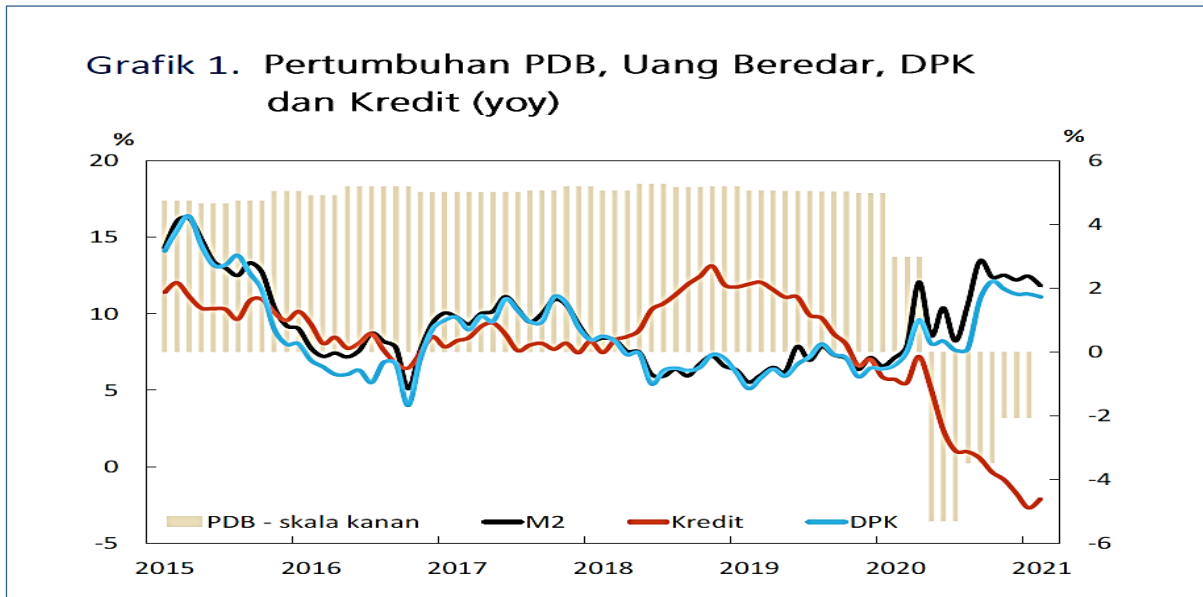
Sumber: Data Bank Indonesia yang diolah
Gambar 4. Jumlah Uang Beredar Tahun 2016-2020

Jumlah uang beredar dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Jumlah Uang beredar tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan diantara tahun-tahun sebelumnya. Kenaikannya sekitar 700an triliun rupiah yang pada beberapa tahun sebelumnya kenaikan tidak ada yang lebih dari 500 triliun dalam perbandingan *year on year (yoy)*. Fenomena ini konsisten dengan penurunan BI rate yang dilakukan BI mulai tahun 2019 hingga tahun 2020.

BI rate memicu bank-bank menurunkan suku bunga, sehingga pembiayaan diharapkan meningkat. Namun, jika ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka tujuan bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga belum tercapai. Hal ini merujuk pada penelitian yang menemukan korelasi positif antara uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi (Zakiah & Usaman: 2019). Ada signal bahwa uang yang beredar di masyarakat digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Hal ini ditunjukkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada masa pandemi, sementara nilai kredit menurun jauh. Kondisi ini diperkirakan karena masyarakat terlalu berhati-hati dalam mengalokasikan uangnya, sehingga uang beredar yang tumbuh hanya “mengendap” di bank. Hal itu dikuatkan dengan angka kredit yang menurun cukup drastis di tahun 2020. Kesimpulannya. Pertumbuhan uang beredar menaik sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Fenomena masyarakat yang lebih memilih menempatkan dananya pada giro, deposito atau tabungan (sebagai DPK) merupakan cerminan dari ketidakpastian ekonomi sektor riil. Mereka rela mendapatkan nilai jasa lebih sedikit dari hasil deposito daripada harus menanggung kerugian jika berinvestasi pada proyek yang berisiko. Pandemi covid-19 membuat ketidakpastian yang luar biasa sehingga dana-dana yang tersedia mengendap di bank. Hal seperti ini pun harus dicermati oleh industri keuangan yang mana mereka mengalami penurunan pendapatan akibat permintaan kredit yang rendah. Sementara, mereka harus membayar jasa dari dana pihak ketiga sesuai ketentuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter sebagai suatu alat. Kebijakan fiskal harus tetap dikedepankan sebagai suatu kebijakan yang memiliki dampak riil dalam waktu yang relatif lebih singkat daripada kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya memiliki *lag* waktu untuk mencapai harapan yang dikehendaki. Meskipun, BI telah menerbitkan BI7DRR yang mana proses pencairan likuiditas pembeli SBI memiliki waktu yang lebih singkat (kelipatan 7 hari).

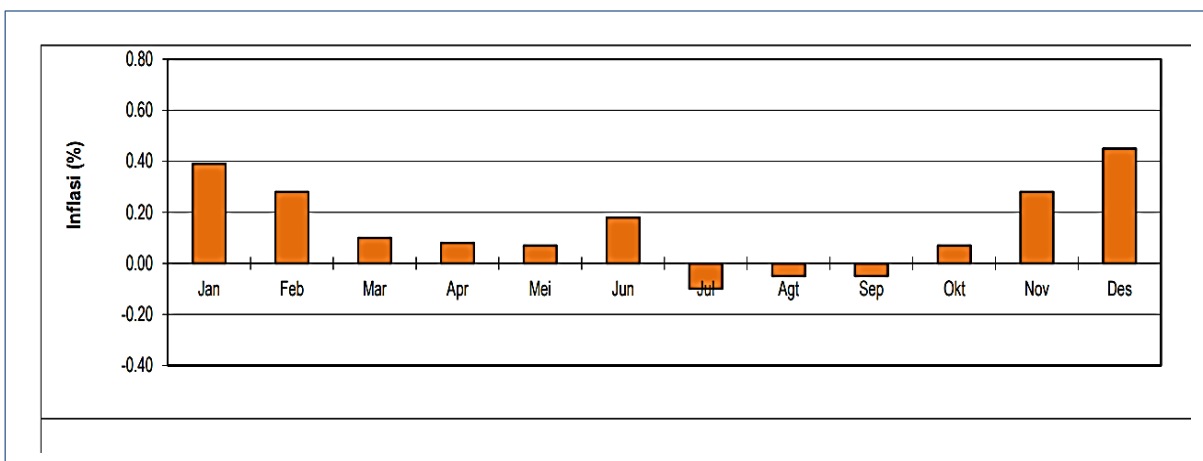


Sumber: Bank Indonesia (2021)

Gambar 5. Pertumbuhan PDB, Uang Beredar, Dana Pihak Ketiga, dan Kredit

Inflasi pada Masa Pandemi Covid-19

Inflasi pada tahun 2020 menunjukkan angka terendah yaitu 1,68 persen. Sejak era reformasi nilai ini merupakan yang paling rendah. Selama tahun 2020 terjadi 9 bulan mengalami inflasi dan 3 bulan mengalami deflasi. Ketiga bulan yang mengalami deflasi adalah bulan juli, agustus, dan september. Di ketiga bulan tersebut pembatasan kegiatan masyarakat sedang digalakkan oleh pemerintah sehingga berdampak pada lambatnya perekonomian. Bulan juli dan agustus yang biasanya memiliki nilai inflasi tinggi karena kebutuhan pendidikan dan rekreasi, tahun ini mengalami deflasi. Ada dugaan bahwa beberapa masyarakat menunda pendidikan dikarenakan tidak puas dalam menjalani pendidikan secara daring. Di samping itu, pada bulan juli dan agustus yang biasanya sektor rekreasi, olahraga dan budaya menyumbang angka inflasi tinggi. Pada tahun 2020 nilainya menurun karena pembatasan kegiatan masyarakat. Pusat rekreasi banyak yang ditutup sementara, industri olahraga nasional ditunda, serta parade kebudayaan juga ditiadakan.

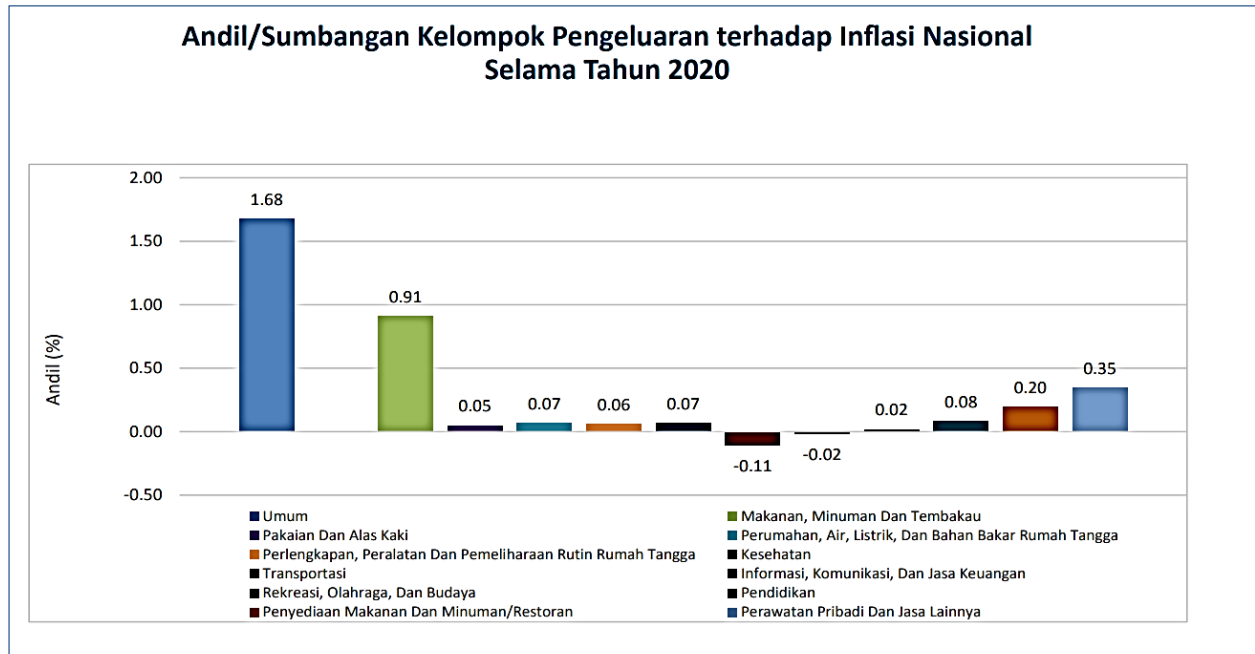


Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 6. Perkembangan Inflasi Nasional selama Tahun 2020

Lesunya ekonomi akibat pandemi diduga menjadi penyebab utama angka inflasi yang rendah. Meskipun sebetulnya angka inflasi yang kecil adalah nilai yang diharapkan oleh otoritas moneter, namun

disisi lain angka inflasi yang rendah biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang rendah pula. Transaksi barang dan jasa diperkirakan melambat karena banyak perusahaan yang mengurangi produksinya. Hal ini juga dikarenakan masyarakat yang cenderung mengurangi konsumsi dikarenakan menurunnya pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 7. Sumbangan kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional Tahun 2020

Dilihat dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memiliki andil inflasi tertinggi (0,91%) diantara kelompok yang lain. Fenomena ini diduga kebutuhan bahan pokok yang masih tinggi untuk mensupply logistik pemerintah dalam memenuhi bantuan sosial terhadap masyarakat. Hal ini konsisten dengan angka positif pada sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ada dua kelompok yang menunjukkan angka deflasi yaitu (a) kelompok transportasi serta (b) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok transportasi mengalami deflasi yang tertinggi yaitu (-0,11%). Mobilitas masyarakat yang terbatas membuat transaksi di bidang transportasi turun secara drastis. Banyak perusahaan dalam industri penerbangan yang mengalami kerugian cukup tinggi akibat sepi penumpang. Begitu pula dalam perkeretaapian, bus, maupun biro perjalanan. Jasa informasi dan komunikasi mengalami deflasi diperkirakan karena persaingan harga yang ditetapkan para penyedia jasa. Kebutuhan informasi dan komunikasi yang meningkat akibat banyaknya kegiatan secara daring direspon positif oleh para perusahaan telekomunikasi. Persaingan industri telekomunikasi yang kompetitif, membuat harga jasa informasi dan komunikasi dapat diterima oleh konsumen pada harga yang lebih rendah.

Pada kelompok (a) pakaian dan alas kaki; (b) perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; (c) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; serta (d) kesehatan, menyumbang angka inflasi yang hampir beragam pada kisaran 0,05% s.d. 0,07%. Permintaan terhadap kelompok a,b, dan c tergolong logis dan dinilai stabil disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kelompok dibidang kesehatan menyumbang angka inflasi yang relatif kecil meskipun kebutuhan akan kesehatan sangat tinggi pada masa pandemi. Hal ini diduga ada aturan pembatasan harga yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga harga-harga barang atau jasa pada bidang kesehatan kenaikannya masih terkendali.

Kenaikan inflasi relatif tinggi juga dikontribusikan pada kelompok restoran dan perawatan pribadi. Permintaan terhadap makan atau minum di restoran yang menurun diperkirakan justru menekan harga barang atau jasa pada kelompok restoran. Pengusaha restoran menghendaki harga tinggi untuk beberapa kalangan yang masih membutuhkan restoran sebagai tempat favorit untuk makan, minum, atau berkegiatan yang lain. Hal demikian juga terjadi pada kelompok usaha perawatan pribadi. Menurunnya kuantitas

pelanggan, menyebabkan harga dinaikkan untuk sasaran para pelanggan yang loyal. Hal demikian bertujuan agar mengcover pendapatan agregat perusahaan. Pelanggan loyal masih bersedia membayar dengan harga tinggi, jika mendapatkan kepuasan pelayanan.

Dua sektor terakhir yang menyumbang angka inflasi adalah sektor (a) rekreasi, olahraga, dan budaya; serta (b) pendidikan. Beberapa sektor rekreasi tetap diperbolehkan untuk beroperasi meskipun harus mentaati aturan dengan menaikkan harga yang ditetapkan oleh sejumlah daerah. Selisih kenaikan harga pada sektor rekreasi dari harga normal digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Sektor pendidikan mengalami kenaikan sebesar 0,08% yang mana nilainya konsisten di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kenaikan biaya operasional pendidikan yang rata-rata selalu mengalami kenaikan di setiap tahun.

V. SIMPULAN

Sesuai pertanyaan penelitian, kesimpulan diuraikan dalam empat bagian yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merosot pada angka negatif di tahun 2020 (masa pandemi covid 10) yaitu sebesar (-2,07) %. Angka ini merupakan yang terburuk sejak era reformasi (setelah tahun 1998). Diukur dari perspektif lapangan usaha, semua komponen bernilai negatif kecuali sektor pertanian. Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah (a) perdagangan dan reparasi; (b) pertambangan dan penggalian; (c) industri pengolahan; (d) konstruksi; dan (e) lainnya. Dilihat dari perspektif pengeluaran hanya konsumsi pemerintah yang menunjukkan angka positif. Sementara komponen lain menyumbang angka negatif yaitu (a) konsumsi rumah tangga; (b) konsumsi LNPRT; (c) PMTB; dan (d) ekspor dan impor.
2. BI rate pada angka 3,75 % pada Desember 2020 atau terendah sejak krisis 1997. Sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 BI rate selalu berada pada posisi turun atau bertahan yang mana pada Januari 2019 BI rate pada angka 6%. Pada 2020, bank Indonesia menurunkan BI rate untuk menstimuli sektor usaha produktif prioritas agar memanfaatkan pinjaman pada lembaga keuangan dengan jasa yang rendah. Hal ini bertujuan agar perekonomian nasional kembali pulih meskipun masih dalam kondisi pandemi covid-19.
3. Uang beredar menunjukkan angka peningkatan yang tinggi pada Desember 2020 sebesar 6.900 triliun rupiah dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun 2019 sebesar 6.136 triliun rupiah. Angka kenaikan yang sangat tinggi dibanding dengan kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada mencapai selisih kenaikan lebih dari 500 triliun rupiah di setiap tahunnya. Kenaikan uang beredar ini cukup ironi jika dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dan jumlah kredit. Jumlah permintaan kredit berkontraksi pada angka negatif akibat ketidakpastian usaha karena masa pandemi covid-19. Perusahaan atau investor lebih memilih menempatkan dananya dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro (sebagai DPK) meskipun memiliki tingkat keuntungan relatif sedikit. Hal ini dianggap lebih baik daripada menanggung risiko kerugian jika dana diinvestasikan pada proyek yang mengalami ketidakpastian.
4. Inflasi pada tahun 2020 berada pada angka terendah yaitu 1,68 persen dibandingkan beberapa tahun terakhir. Di tahun tersebut terdapat tiga bulan yang mengalami angka deflasi yaitu Juli, Agustus, dan September. Sementara, pada bulan lainnya mengalami angka inflasi meskipun nilai cenderung lebih rendah jika dibandingkan pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Dilihat dari sisi pengeluaran, terdapat dua kelompok yang mengalami andil negatif yaitu : (a) transportasi; serta (b) informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Sementara, kelompok lainnya menyumbang angka inflasi positif yaitu : (a) pakaian dan alas kaki; (b) perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; (c) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; (d) kesehatan; (e) rekreasi, olahraga, dan budaya; (f) pendidikan; (g) restoran; (h) perawatan pribadi dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2002. *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. Jakarta
- Arif, D. 2014. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, dan BI Rate terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia Periode 2007-2013. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 19(3).

- Bank Indonesia. 2021. Uang Beredar dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Divisi Statistik Moneter dan Fiskal*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi*: No. 01/01/Th. XXIV, 04 Januari 2021
- Boediono. 1988. *Ekonomi Moneter*. BPFE: Yogyakarta.
- IMF. 2021. *World Economic Outlook Update : Latest World Economic Outlook Growth Projections*. January 2021
- Khairiati. S., Sari, C.P.M. 2019. Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 1987-2017 (Pendekatan ARDL). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 02(03) Desember 2019.
- Krisnaldy. 2017. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Produk Domestik Bruto, Kurs, dan Tingkat Bunga terhadap Inflasi di Indonesia Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Kreatif; Pemasaran, Sumberdaya Manusia dan Keuangan*, 5(1), Oktober 2017.
- Sipayung, P.T.E., Budhi, M.K.S. 2013. Pengaruh PDB, Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1993-2012. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 2(7), Juli 2013.
- Solikin & Suseno. 2002. *Penyusunan Statistik Uang Beredar*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta.
- Solikin & Suseno. 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2010. *Makroekonomi : Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Zakiah & Usman, U. 2019. Hubungan Jumlah Uang Beredar, Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pendapatan Nasioanl di Indonesia Menggunakan Model Dinamis. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 02(02), Agustus 2019.